



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
- Masa Persidangan : V
- Rapat : Ke – 22 (dua puluh dua)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kemenperin RI dengan menghadirkan perusahaan pengembang kawasan industri
- \Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
- Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
- Acara : 1. Progres pembangunan Kawasan Industri
2. Lain-lain
- Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto
(Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.NasDem)
- Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos.
- Hadir : A. Pemerintah
- Dirjen ILMATE Kemenperin RI (Direktur Industri Logam)
- Dirjen KPAIL Kemenperin RI
- B. Stakeholder
- Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
- Dirut PT Indonesia Wedabay Industrial Park (IWIP)
- Dirut PT Anugrah Tambang Industri (ATI)
- Dirut PT Ration Bangka Abadi (Kawasan Industri Sadai)
- C. 22 Orang Anggota dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:
22 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
28 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 20 Juni 2023 dibuka pukul 13.45 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres pembangunan Kawasan Industri
 - b. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan industrialisasi di setiap Kawasan Industri dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI untuk membuat perencanaan pengembangan Kawasan Industri terintegrasi.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI agar mengusulkan ke Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara komprehensif dan holistik terutama terkait pengenaan PPN sebesar 11% pada produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel), ingot (timah), agar industri pengolahan lanjutan lebih kompetitif.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI agar memastikan pengelola Kawasan Industri tidak hanya memfasilitasi tenant bermodal besar, tapi juga kepada pelaku IKM dan UMKM dalam rangka mengembangkan industri turunan dan rantai pasok dari komoditas unggulan kawasan.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI untuk berkoordinasi dengan institusi terkait agar dalam mengeluarkan izin kawasan industri clear and clean dari permasalahan sengketa lahan.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian RI untuk mengembangkan roadmap pengembangan kawasan industri strategis yang

berbasis karakteristik unggulan lokal yang memiliki potensi dan daya saing internasional.

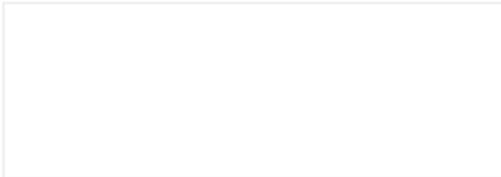
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT IMIP, Dirut PT IWIP, Dirut PT ATI dan Dirut PT RBA untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat pada tanggal 27 Juni 2023

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.50 WIB

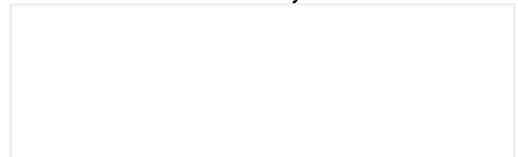
Jakarta, 20 Juni 2023

DIRJEN KPAII KEMENPERIN RI



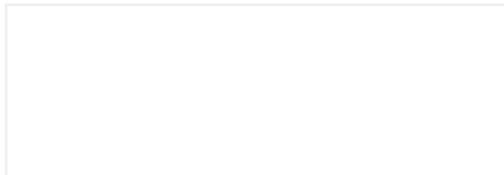
EKO S.A CAHYANTO, SH, LL.M

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO
A-373

DIREKTUR INDUSTRI LOGAM KEMENPERIN RI



Ir. LILIEK WIDODO. M.Si